



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
2017-2022**



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat provinsi, ketiga bentuk perencanaan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari capaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 2025”, yang ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM.
3. Mewujudkan pemerintahan yang amanah.
4. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan
5. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Saat ini pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada tahap ketiga RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 yang difokuskan pada upaya untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian daerah serta upaya pemenuhan kapasitas dan kualitas SDM.

Upaya peningkatan perekonomian daerah pada tahapan ini dilakukan pada upaya untuk memberikan nilai tambah pada produk unggulan provinsi dengan perhatian dan tumpuan utama pada keterkaitan industri hulu ke hilir yang saling bersinergi. Sebagai contoh: hasil pertanian ubi (singkong) dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan pengganti beras untuk lebih meningkatkan ketahanan pangan, dari kelapa sawit selain menghasilkan CPO, pada saat ini hendaknya juga bisa dimanfaatkan untuk biogas. Demikian juga dengan hasil perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budi daya agar dapat dikembangkan menjadi produk-produk makanan yang memiliki nilai tambah, selain itu dapat diupayakan pengembangan industri-industri pengolahan ikan yang memiliki daya saing ekspor.

Selain itu, perhatian terhadap pengembangan kualitas SDM pada semua aspek menjadi perhatian dalam upaya untuk semakin memantapkan pembangunan ekonomi daerah. Dukungan SDM yang berkualitas, profesional, berwawasan Ilmu Pengetahuan dan berbekal iman dan taqwa yang kuat menjadi satu kesatuan dengan upaya untuk mempersiapkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi tantangan global.

Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Bangka Belitung sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di provinsi ini. Pada periode ini, perkembangan teknologi terutama teknologi informasi dan ilmu pengetahuan

sudah relatif sangat maju, oleh karena itu pengembangan SDM diarahkan/dititikberatkan pada SDM yang mampu mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan potensi ekonomi yang mereka dimiliki.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan kualitas SDM adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi dan berfungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi; penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi; penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, melalui upaya peningkatan pengembangan skala usaha KUMKM, mengoptimalkan sarana pemasaran produk KUMKM, upaya

peningkatan akses anggota Koperasi dan UMKM terhadap perbankan, peningkatan pengawasan dan pembinaan koperasi, serta meningkatkan bantuan terhadap akses permodalan, pendampingan teknis, pengawasan dan pelatihan manajemen dalam pengembangan KUMKM.

Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah dititikberatkan pada penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat seperti usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan daerah di wilayah pedesaan/kecamatan/ kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah. Pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah dalam rangka pembangunan ekonomi masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan dan pembangunan (reoptimalisasi, revitalisasi dan reaktualisasi) usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan.

Untuk melaksanakan visi, misi, strategi, kebijakan dan program Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam RPJMD, Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui tugas pokok dan fungsinya, menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan analisa lingkungan internal dan eksternal (SWOT), melalui penggunaan data dan informasi yang dikumpulkan, masukan-masukan berupa saran dan pendapat berbagai pihak termasuk diskusi-diskusi dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat, hasil rapat koordinasi dengan Kepala Dinas dan staf dari kabupaten/kota yang membidangi urusan koperasi dan UMKM, pendapat dan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, termasuk

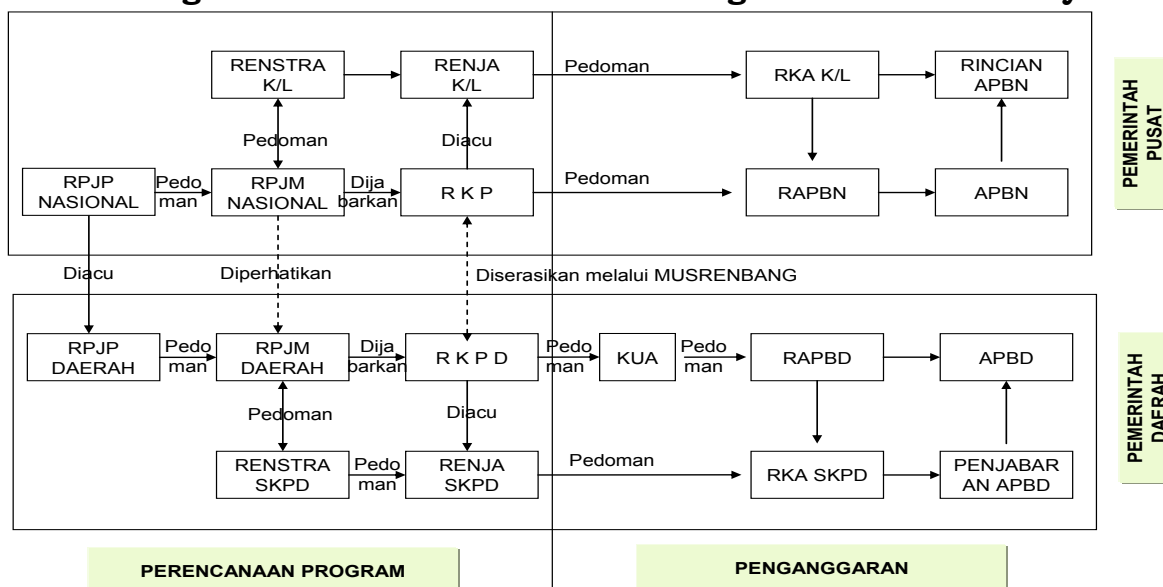
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan nasional menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 yang memuat visi, misi Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Hubungan antar dokumen perencanaan lainnya dengan Renstra mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana digambarkan sebagai berikut.

Gambar I.1

Hubungan Dokumen Renstra SKPD dengan Dokumen Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 adalah:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri A);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 adalah penjabaran visi, misi, strategi, tujuan, sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 ke dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk jangka 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2017 - 2022;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahunan daerah yang dilaksanakan oleh OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai pedoman OPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2017 - 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang

Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Perangkat Daerah

4.2 Hubungan Tujuan dan sasaran
Jangka Menengah Perangkat Daerah
dengan Tujuan dan sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pengembangan ekonomi kerakyatan diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan wilayah Desa/Kota, dengan penekanan pada agri bahari melalui kelembagaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan, seimbang, dan demokratis, peningkatan PDRB perkapita masyarakat, serta menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pengembangan ekonomi kerakyatan dilakukan melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/Kecamatan/Kabupaten/Kota yang sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektoral.

Konektivitas pembangunan desa-kota didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan konsumsi sehingga kemajuan desa-kota saling mendukung dan menunjang secara simultan, dan ekonomi desa dapat tumbuh menjadi pusat produksi komoditi yang bernilai tambah sehingga dapat mengatasi penangguran dan kemiskinan.

Perekonomian dikembangkan dan diarahkan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam berusaha secara adil dan seimbang dalam semua sektor ekonomi serta kesempatan memperoleh akses sumber daya ekonomi produktif seperti lahan, wilayah tempat usaha, permodalan dan teknologi secara seimbang, sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal

melalui peningkatan keterkaitan dan sinergitas kegiatan ekonomi perkotaan dan perdesaan.

Di bawah ini diuraikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi Balai Latihan Koperasi dan UMKM sebagai berikut:

2.1.1 KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tugas : memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. penyelenggaraan dan pengkoordinasian UPTD;

- f. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- g. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Tugas : memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengkoordinasikan bidang-bidang.

Fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.3 BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN

Tugas : memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan dan penyiapan bahan kebijakan kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
- b. penyelenggaraan dan pengkoordinasian kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
- c. penyelenggaraan evaluasi kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan, pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.4 BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KECIL

Tugas: memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha kecil.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan;
- b. penyelenggaraan dan pengkoordinasian fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan;
- c. penyelenggaraan evaluasi fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan;

- d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.5 BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI

Tugas: memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan kebijakan fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
- b. penyelenggaraan dan pengkoordinasian fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
- c. penyelenggaraan dan pengkoordinasian evaluasi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.6 UPTD BALAI PELATIHAN PERKOPERASIAN DAN UMKM

Tugas: melaksanakan pelatihan tenaga Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM).

Fungsi:

- a. penyelenggara pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM
- b. penyelenggara dan koordinasi pelatihan tenaga KUMKM.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2016 dalam melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan didukung sebanyak 86 orang pegawai (PNS dan PHL), dengan status kepegawaian 50 orang PNS. Jumlah tenaga honorer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 berjumlah 36 orang. Kualifikasi Pendidikan Pegawai S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 29 orang, D3 sebanyak 7 orang, SMU sebanyak 7 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 14 orang.

Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 berdasarkan jenjang pendidikan, eselonering dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	5	2	7
3	Sarjana / S1	15	14	29
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	3	4	7
6	Diploma-I/II	-	-	-
7	SLTA	5	2	7
	JUMLAH	28	22	50

Tabel 2.2
Klasifikasi PNS dan CPNS di Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Eselonering

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II	-	1	1
2	III	3	2	5
3	IV	8	6	14
4	Non Eselon	16	14	30
	JUMLAH	27	23	50

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, sampai saat ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin relatif cukup terpenuhi, misalnya saja setiap pegawai memiliki komputer sebagai alat bantu kerja yang utama. Kebutuhan akan listrik, telepon, faximili dan internet telah terpenuhi. Selain itu Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah juga memiliki Gedung Balai Latihan Perkoperasian dan UMKM serta Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

Tabel 2.3 berikut menampilkan aset Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Juli 2017.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Buku Inventaris
Milik Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

(No	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
	A		ASET TETAP		Rp. 14.079.456.668
1	01	01	TANAH	0	-
2	02		PERALATAN DAN MESIN	229	Rp. 3.415.581.168
		02	Alat-alat Besar	0	
		03	Alat-alat Angkutan	22	Rp. 1.023.569.000
		04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	0	
		05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	
		06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	203	Rp. 2.320.998.750
		07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	4	Rp. 71.013.418
		08	Alat-alat Kedokteran	0	
		09	Alat-alat Laboratorium	0	
		10	Alat-alat Keamanan	0	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	2	Rp. 10.346.805.000
		11	Bangunan Gedung	2	Rp. 10.346.805.000
		12	Bangunan Monumen	0	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	5	Rp. 307.073.000
		13	Jalan dan Jembatan	0	
		14	Bangunan Air / Irigasi	0	-
		15	Instalasi	0	-
		16	Jaringan	5	Rp. 307.073.000
5	05		ASET TETAP LAINNYA	128	Rp. 9.997.500
		17	Buku Perpustakaan	128	Rp. 9.997.500
		18	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan		
		19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	-
			Lain-lain	0	-
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1	Rp. 610.109.500
7	B		ASET LAINNYA	1	Rp. 610.109.500
	01		Aset Tak Berwujud	0	-
	02		Aset Lain-lain	0	-
				365	14.689.566.168

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Juli 2017

2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berikut adalah tabel pencapaian target indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016:

Tabel 2.4
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2012 – 2016

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Bertambahnya Koperasi & Bertambahnya UMKM				21 Unit & 3.500 Unit	21 Unit & 3.500 Unit	21 Unit & 3.500 Unit			30 Unit & 3.617 unit	48 Unit & 3.991 Unit	27 Unit & 3.225 Unit			142,85 103,34	228,57 114,02	128,57 92,142		
2.	Bertambahnya Jumlah Koperasi Berkualitas				33 Unit	33 Unit	33 Unit			30 Unit	36 Unit	28 Unit			90,90	109,09	84,848		
3.	Bertambahnya Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional				1 Unit	1 Unit	1 Unit			2 Unit	5 Unit	5 Unit			200	500	500		
4.	Persentase Pelaksanaan RAT Koperasi				56 %	56 %	57 %			40%	39,82 %	39,82 %			71,43	71,107	69,877		
5.	Bertambahnya Koperasi Skala Besar				3 Unit	3 Unit	1 Unit			3 Unit	6 Unit	6 Unit			100	200	200		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6.	Persentase Koperasi Aktif				82 %	83 %	84 %			80 %	78,92 %	68,42 %			97,56	95,084	81,452		
7.	Bertambahnya Ragam Kemasan KUMKM				4 Jenis	4 Jenis	6 Jenis			20 Jenis	38 Jenis	69 Jenis			500	950	1150		
8.	Diterbitkannya Sertifikat Halal untuk UMKM				0 Unit	5 Unit	20 Unit			0 Unit	16 Unit	40 unit			0	320	200		
9.	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil				250 Unit	252 Unit	252 Unit			415 Unit	800 Unit	166 Unit			166	317,46	65,873		
10.	Meningkatnya Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah				8 Unit	8 Unit	8 Unit			10 Unit	40 Unit	5 Unit			125	500	62,5		
11.	Terpilihnya UMKM Berprestasi Tingkat Nasional				0 Unit	0 Unit	1 Unit			0 Unit	0 Unit	1 Unit			0	0	100		
12.	Bertambahnya Modal				66 Milyar	66 Milyar	67 Milyar			66,128	67,055	60,596			100,19	101,59	90,441		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Sendiri Koperasi									Milyar	Milyar	Milyar							
13.	Persentase Tersalurkan Kredit Oleh Perbankan Kepada UMKM dari Total Kredit yang Disalurkan				52%	53 %	54 %t			57%	68,01 %	44,70 %			109,62	128,32	82,77		
14.	PT. Jamkrida Babel Menjamin UMKM					0 Unit	212 Unit				0 Unit	0 Unit							
15.	- Tersalurnya Kredit Perbankan Kepada KUMKM - Tersalurnya Dana BUMN/Csr kepada KUMKM - Tersalurnya Dana Bantuan Hibah Pemerintah - Tersalurnya Dana LPDB Sebesar					2,300 Triliun	2,400 Triliun				9,752 Triliun	3,213 Triliun			424	133,88			
					22 Milyar	23 Milyar				463,88 Milyar	22,23 Milyar			610	97				
					76 Milyar	77 Milyar				6,69 Milyar	41,665 Milyar			9	164				
					1,7 Milyar	1,7 Milyar				10,015 Milyar	2,790 Milyar			589					

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
16.	Bertambahnya Volume Usaha Koperasi				650 Milyar	660 Milyar	670 Milyar			813 Milyar	1030 Milyar	518 Milyar			125,08	156,06	77,31		
17.	Bertambahnya Volume Usaha UMKM				2,0 Triliun	2,0 Triliun	2,0 Triliun			1,21 Triliun	1,29 Triliun	1,45 Triliun			60,05	64,5	72,5		
18.	Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang ditampung oleh Koperasi				200 Orang	200 Orang	200 Orang			311 Orang	366 Orang	366 Orang			155,5	183	183		
	Bertambahnya Jumlah Tenaga Kerja Yang ditampung oleh UMKM				21.000 Orang	21.000 Orang	21.000 Orang			22.246 Orang	25.829 Orang	5.692 Orang			105,93	122,99	27,104		
19.	Pembangunan Pasar Tradisional Yang Tersebar di 7 Kab/Kota					4 Unit	5 Unit				12 Unit	2 Unit				300	40		
20.	Terwujudnya yang Memasarkan Produknya Keluar Daerah/Antar Daerah/Antar Pulau				5 Unit	5 Unit	18 Unit			11 Unit	38 Unit	25 Unit			220	760	138,88		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
21.	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perikanan					2 %	2 %				3,80 %	28,7 %				190	1435		
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perkebunan					4 %	4%				25,97 %	3,8 %				639,25	95		
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Pariwisata					1 %	1 %				1,89 %	1 %				189	100		
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Perdagangan					6 %	6 %				10,0 %	2 %				180	33,333		
	Meningkatnya Jumlah Koperasi Menangani Pangan					5 %	5 %				1,64 %	1 %				32,8	20		
22.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dengan					6 Kali	6 Kali				8 Kali	6 Kali				133,33	100		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pemerintah Pusat																		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dengan Instansi Provinsi					4 Kali	4 Kali				6 Kali	4 Kali				150	100		
	Terlaksananya Rapat Koordinasi Dengan Dinas Kab/Kota dan Dengan Lintas Lembaga					10 Kali	10 Kali				12 Kali	12 Kali				120	120		
23.	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga Perbankan					6 Buah	12 Buah				6 Buah	7 Buah				100	58,33		
	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama dengan Lembaga Penjaminan Kredit					1 Buah	2 Buah				1 Buah	2 Buah				100	100		
	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama dengan					14 Buah	14 Buah				14 Buah	11 Buah				100	78,571		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	BUMN																		
24.	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Forum					3 Kali	3 Kali				3 Kali	2 Kali				100	66,666		
25.	Terwujudnya Koordinasi dan Kerjasama Pengembangan Produk Kreatif di 7 Kab/Kota					2 Kali	2 Kali				2 Kali	0 kali				100			
26.	Terbentuknya Tim Pengawasan Koperasi, dan					8 Tim	8 Tim				8 Tim	8 Tim				100	100		
	Pokja Pengawasan Koperasi					1 Pokja	0				1 Pokja	0				100			
27.	Bertambahnya SDM Pembina					12 Orang	12 Orang				5 Orang	5 Orang				41,666	41,666		
28.	Terlatihnya SDM					12 Orang	12 Orang				19 Orang	19 Orang				158,33	158,33		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Pembina																		
29.	Bertambahnya SDM Koperasi & Tenaga Kerja UMKM					200 Orang	200 Orang & 3.500 Orang				960 Orang	73 Orang & 3.083 Orang				480	36,5	88	
30.	Terlatihnya SDM Koperasi					400 Orang	400 Orang				478 Orang	278 Orang				119,5	0,695		
	Terlatihnya SDM UMKM					200 Orang	250 Orang				419 Orang	710 Orang				209,5	284		
31.	Terwujudnya Jaringan Komunikasi Informasi Koperasi dan UMKM					0 Buah	2 Buah				0 Buah	0 Buah							
32.	Bertambahnya Penyuluh dan Pencacah Data					5 Orang	5 Orang				5 Orang	5 Orang				100	100		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Koperasi dan UMKM																		
33.	Terwujudnya Pembangunan Kantor Dinas,					0 Unit	1 Unit				0 Unit	0 Unit							
	Balatkop dan UMKM					1 Unit	1 Unit				1 Unit	1 Unit							
	Serta Gedung Promosi dan Bisnis KUMKM					0 Unit	0 Unit				0 Unit	0 Unit							
34.	Pertumbuhan Koperasi Aktif							886 Unit	53 Unit				812 Unit	0 Unit				91,647	
35.	Pertumbuhan Koperasi Sehat							15 Unit	15 Unit				75 Unit	7 Unit				500	46,666
36.	Pertumbuhan Koperasi Berkualitas							33 Unit	23 Unit				166 Unit	42 Unit				503,03	182,60
37.	Pertumbuhan UMKM							294.035 Unit	2.941 Unit				291.799 Unit	(25.516) Unit				99,239	-867,5
38.	Peningkatan Usaha Kecil Menjadi Usaha							749 Unit	15 Unit				879 Unit	(304) Unit				117,35	2026,6

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Menengah																		
39.	Peningkatan Jumlah Bantuan Permodalan Usaha Kepada KUKM							239.790 Milyar	9.690 Milyar				182.969 Milyar	111.466 Milyar				76,303	1150,3
40.	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha KUKM Yang Mengakses Bantuan Permodalan							40.460 Unit	1.220 Unit				13.264 Unit	15.220 Unit				32,783	1247,541
41.	Terlatihnya SDM Koperasi dan UMKM							305 Orang	305 Orang				359 Orang	750 Orang				117,7049	245,9016

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah 2012 2016
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		181.050.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		170.988.079	12.606.211	15.522.360	19.086.420		94,44	50,42	60,09	76,35		
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		48.000.000	192.000.000	301.400.000	85.095.000		17.310.180	95.590.239	192.850.240	79.476.300		36,06	49,79	63,98	93,40		
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		59.520.000	117.420.000	131.580.000	160.230.000		52.760.000	117.420.000	131.580.000	160.140.000		88,64	100	100	99,95		
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		82.200.000	210.600.000	35.800.000	30.000.000		81.957.000	203.584.500	35.791.500	29.988.500		99,70	96,67	99,98	99,96		
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor		150.000.000	200.000.000	150.000.000	115.920.000		149.389.600	160.345.400	149.331.250	115.918.250		99,59	80,17	99,55	99,99		
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		70.000.000	75.000.000	82.000.000	85.000.000		65.953.200	72.907.000	59.435.400	69.543.000		94,22	97,21	71,48	81,82		
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		9.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000		6.720.000	16.045.000	15.000.000	15.000.000		74,67	80,23	100	100		
8. Penyediaan Makanan dan Minuman		15.000.000	30.000.000	40.000.000	35.000.000		7.830.575	29.320.500	35.342.700	32.916.600		52,20	97,74	88,36	94,05		
9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar		420.000.000	709.868.000	400.000.000	298.420.000		391.550.449	709.147.900	399.606.800	298.417.790		93,23	99,90	99,90	99,99		

Uraian *** (1)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	1 (7)	2 (8)	3 (9)	4 (10)	5 (11)	1 (12)	2 (13)	3 (14)	4 (15)	5 (16)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
Daerah																	
10. Penyediaan Jasa Penunjang Pengolahan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0		386.100.000	643.500.000	1.029.690.000	0		382.800.000	641.850.000	1.029.600.000			99,15	99,74	99,99		
11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0		15.000.000	30.000.000	0	0		15.000.000	22.885.000				100	76,28		
12. Koordinasi, Konsolidasi ke dalam Daerah	0	0	0		50.000.000	0	0	0		49.961.400					99,92		
13. Sebelumnya Operasional UPT Bala Pelatihan Koperasi dan UMKM Berubah Menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM	0	0	0		360.140.000	0	0	0		253.043.300					70,26		
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
14. Pembuatan DED dan Pekerjaan Penimbunan Tanah Gedung Kantor	0		562.300.000	0	0	0	0	476.851.000	0	0			84,80				
13. Pengadaan	0		275.000.000	0	0	0		269.894.000	0	0			98,14				

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kendaraan Dinas/Operasional																	
14. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		99.000.000	565.780.000	117.950.000	261.700.000		84.250.000	543.222.000	111.537.500	245.562.000		85,10	96,01	94,56	93,83		
15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		0	332.050.000	226.700.000	0		0	306.740.000	208.950.000	0			92,38	92,17			
16. Pengadaan Meubelair		52.350.000	460.200.000	85.950.000	0		44.250.000	407.240.000	72.062.500	0		84,53	88,49	83,84			
17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional		180.570.000	227.730.000	217.880.000	243.880.000		120.981.836	194.339.550	180.224.050	189.166.950		66,99	85,34	82,72	77,57		
18. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		20.000.000	25.000.000	40.000.000	20.000.000		5.080.000	25.000.000	36.060.000	19.945.000		25,4	100	90,15	99,73		
19. Pembangunan Gedung Kantor		0	0	5.212.927	0		0	0	5.191.785.2500						99594,45		
20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		0	0	30.000.000	0		0	0	29.160.000	0				97,2			
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
18. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		9.700.000	26.350.000	27.550.000	0		6.600.000	26.350.000	27.550.000	0		68,04	100	100			
19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		0	21.550.000	20.000.000	42.000.000		0	21.550.000	20.000.000	42.000.000			100	100	100		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
D. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif																	
20. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		49.750.000	85.000.000	34.400.000	144.800.000		49.672.0000	84.268.700	34.399.000	140.016.000		998,43	99,99	96,70			
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja Keuangan																	
21. Penyusunan LAKIP, LPPD, dan LAPJ SKPD		0	12.900.000	11.100.000	0		0	10.511.000	11.100.000	0			81,48	100			
F. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM																	
22. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan		941.200.000	511.200.000	548.420.000			911.671.800	458.791.600	440.226.800			96,86	89,75	80,27			
23. Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi		259.120.000	155.000.000	145.000.000			214.905.000	153.720.000	144.158.300			82,94	99,17	99,42			
24. Pelatihan dan Pendampingan		232.606.000	0	0			204.504.100	0	0			87,92					

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Inovasi/Ide Desain Kemasan																	
25. Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi		180.910.000	170.170.000	170.920.000	179.4000.000		83.894.000	137.704.800	145.040.100	177.464.750		46,37	80,92	84,86	9,89		
26. Diklat Perkoperasian Bagi Koperasi Sektor Pertanian /Perkebunan			167.475.000	150.000.000				165.114.000	127.270.500				98,59	84,85			
27. Pelatihan AMT		0	0	113.880.000	0		0	0	94.222.500	0				82,74			
28. Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)		0	0	0	136.300.000		0	0	0	0							
G. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Mikro Kecil Menengah																	
28. Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan		168.587.000	290.755.000	205.535.000	102.997.100		123.269.000	224.118.500	164.410.000	81.644.500		73,12	77,08	79,99	79,27		
29. Pengembangan Kluster Bisnis		31.580.000	45.850.000	0	0		28.106.000	45.810.000	0	0		88,99	99,91				
30. Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah Untuk Usaha Kecil		72.760.000	80.440.000	0	0		56.252.000	74.712.000	0	0		77,31	92,88				

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Menengah dan Koperasi																	
31. Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah		703.000.000	0	0	0		613.109.500	0	0	0		87,21					
32. Peningkatan Jaringan Kerjasama Antar Lembaga		33.830.000	52.610.000	19.800.000	0		13.725.000	52.543.000	17.890.000	0		40,57	99,87	90,35			
33. Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran INA CRAFT		243.247.000	200.343.000	0	196.252.000		0	200.015.500	0	196.192.950			99,84		99,97		
34. Pameran Agrinex Expo		137.219.000	0	0	0		0	0	0	0							
35. Sumex Expo		169.561.000	0	0	0		138.522.000	0	0	0		81,69					
36. Forum Lembaga Pengembangan Kewirausahaan		82.320.000	0	0	0		21.977.300	0	0	0		26,70					
37. Operasionalisasi Lembaga Pengembangan Kewirausahaan Prov. Kep. Bangka Belitung		0	23.745.000	0	0		0	18.279.200	0	0			76,98				
38. Pembentukan Forum Kemitraan Antar UMKM		70.360.000	0	35.375.000	0		26.056.000	0	0	0		37,03					
39. Pameran Produk Unggulan Daerah Expo (PPUD Expo)		171.657.000	202.987.000	0	0		140.945.600	171.152.500	0	0		82,11	84,32				
40. Belitung Expo/Belitung		92.243.000	145.290.000	166.554.000	163.591.000		85.632.600	117.872.800	158.556.800	163.347.000		92,83	81,13	95,20	99,85		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fair/Kegiatan Promosi Produk UMKM melalui Pameran di Belitung																	
41.Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran PRJ		500.000.000	266.630.000	432.755.000	580.290.000		440.349.500	266.630.000	368.613.300	560.847.350		88,11	100	85,18	96,65		
42. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian		390.750.000	0	0			348.296.000	0	0			89,14					
43. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi		398.400.000	0	0	74.130.000		113.404.000	0	0	74.087.000		28,46			99,94		
44. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi		189.794.000					157.317.800					82,88					
45.Diseminasi dan Penentuan Produk OVOP di Prov. Kep. Babel		0	0	321.015.000	0		0	0	208.661.100	0					65		
46. Pengadaan Produk Unggulan untuk Galeri UMKM		0	0	46.060.000	0		0	0	0	0							
47. Sebelumnya Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM berubah menjadi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM		0	0	0	67.860.000		0	0	0	0							

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
48. Kegiatan Temu Mitra dengan Rumah Kemas dan Lembaga Pembiayaan		0	0	0	48.194.000		0	0	0	46.800.000					97,11		
49. Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi		0	0	0	136.300.000		0	0	0	0							
H. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																	
46. Penyebaran Model-model Pola Pengembangan Koperasi		330.650.000	0	0			229.706.300	0	0								
47. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)		378.150.000	0	33.230.000	104.376.000		330.475.100	0	23.539.000	92.486.400		87,39		70,84	88,61		
48. Pelatihan Pengawasan Koperasi		137.958.000	132.075.000	130.530.000	0		111.836.000	128.475.000	86.242.850	0		81,06	97,27	66,07			
49. Penilaian Tokoh Koperasi dan Penghargaan Koperasi Berprestasi		50.210.000	58.626.000	53.410.000	53.260.000		39.987.500	48.064.900	47.557.700	48.841.000		79,64	81,98	89,04	91,70		
50. Sosialisasi Guna Mendorong Penumbuhan Koperasi dari Kelompok		217.060.000	0	0	0		169.699.000	0	0	0		78,18					

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Strategis di Pedesaan																	
51. Sosialisasi Guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM)		217.060.000	266.081.000	0	152.625.700		175.353.500	250.770.500	0	134.006.000		80,78	94,25		87,80		
52. Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sekunder		90.340.000	0	45.400.000	0		72.709.500	0	39.080.000	0		80,48		86,08			
53. Pembinaan, Pengawasan & Penghargaan Koperasi Berprestasi		0	101.826.000				0	91.374.500					89,74				
54. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi		0	43.879.000	0	0		0	42.280.000	0	0			96,36				
55. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)		0	85.500.000	0			0	73.905.000					86,44				
56. Bimtek Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)		0	77.175.000	79.650.000			0	73.275.000	52.377.500				94,95	65,76			
57. Sosialisasi Penumbuhan Koperasi Komoditi		0	0	140.000.000			0	0	139.562.400					99,69			
58. Pembenahan Koperasi Pertambangan		0	0	194.376.000			0	0	128.010.800					65,86			

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
I. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah																	
59. Diklat Laporan Keuangan Bagi Koperasi Sektor Pertanian/Perkebunan di Prov. Kep.Babel	0		149.375.000	0	0	0	0	129.435.000	0	0			86,65				
60. Diklat Manajemen Koperasi Sawit	0		129.725.000	0	0	0	0	124.975.000	0	0			96,34				
61. Diklat Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah	0		118.335.000			0	0	118.335.000					100				
62. Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM	0		214.720.000	120.325.000	86.898.000	0	0	214.720.000	115.175.000	81.336.900			100	95,72	93,60		
63. Bimtek Perkoperasian Bagi Pegawai dan PKL	0		105.250.000	82.000.000	0	0	0	100.821.200	81.707.500	0			95,79	99,64			
64. Bimtek Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0	72.300.000	94.498.000	0	0	0	71.272.500	0				98,57			
65. Diklat Manajemen Retail Koperasi	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	117.209.750	0				78,14			
66. Pembuatan Penyusunan Silabus Diklat	0	0	0	143.100.000	0	0	0	0	116.175.150	0				81,18			
67. Bimtek Penyusunan	0	0	0	97.000.000	0	0	0	0	93.095.200	0				95,97			

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Proposal Pembiayaan																	
68. Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam	0	0	0	0	94.498.000	0	0	0	0	79.318.000					83,94		
69. Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi	0	0	0	0	94.498.000	0	0	0	0	79.318.000					83,94		
70. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan AMT bagi Koperasi dan UMKM	0	0	0	0	165.852.000	0	0	0	0	165.145.000					99,57		
71. Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian/Perkebunan di Prov. Kep. Babel	0	0	0	0	94.498.000	0	0	0	0	80.433.000					85,12		
72. Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/Ide Desain Kemasan Produk bagi UMKM	0	0	0	0	99.498.000	0	0	0	0	86.374.100					86,81		
73. Pelatihan Pengawasan Koperasi	0	0	0	0	86.898.000	0	0	0	0	78.959.250					90,86		
74. Pelatihan Perpajakan Koperasi (DAK)	0	0	0	0	224.406.000	0	0	0	0	211.426.750					94,22		
75. Pelatihan Akuntansi Koperasi (DAK)	0	0	0	0	118.878.000	0	0	0	0	113.300.500					95,31		
76. Pelatihan Business Plan (DAK)	0	0	0	0	265.656.000	0	0	0	0	257.952.000					97,10		
77. Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan	0	0	0	0	116.578.000	0	0	0	0	111.219.600					95,30		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pinjam Pola Syariah (DAK)																	
78. Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Kemasan/Desain Produk/Packaging (DAK)	0	0	0	0	235.638.000	0	0	0	0	231.874.000					98,40		
79. Pelatihan Manajemen Keuangan (DAK)	0	0	0	0	451.412.000	0	0	0	0	434.946.250					96,35		
80. Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi (DAK)	0	0	0	0	411.559.000	0	0	0	0	403.144.250					97,96		
81. Pelatihan Pengawasan Koperasi (DAK)	0	0	0	0	175.873.000	0	0	0	0	166.148.150					94,47		
J. Program Pengembangan Koperasi dan PKL																	
82. Fasilitas Pengembangan UMKM Industri Kreatif dan Berbasis Potensi Lokal dengan Melalui Lembaga Koperasi Berbasis		0	146.150.000				0	141.099.100					96,54				

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
OVOP																	
K. Program Pengembangan Koperasi dan UKM Berbasis Potensi Lokal																	
83. Sebelumnya Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badab Usaha UKM berubah Menjadi Pendampingan Pembentukan Badan Usaha UKM		0	0	0	87.484.094		0	0	0	85.284.094					97,49		
84. Sebelumnya Fasilitasi Sertifikat Halal berubah menjadi Sertifikat Halal		0	0	0	275.465.000		0	0	0	275.255.900					99,92		
L. Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah																	
85. Pelatihan Manajemen Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi Bagi 20 UMKM	0	0	104.350.000	93.375.000	0	0	0	68.891.300	85.622.500	0			66,02	91,70			

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
86. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Pengembangan Koperasi dan UMKM Lintas Sektor, Lintas Lembaga dan Lintas Wilayah	0	0	91.270.000	0	0	0	0	60.652.400	0	0			66,50				
87. Penyusunan Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	0	0	0	0	40.424.000	0	0	0	0	37.565.800					92,93		

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang

2.4.1.1 Identifikasi faktor Internal (kekuatan dan kelemahan)

Untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017 – 2022, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelum pelaksanaan Program dan kegiatan OPD melakukan indentifikasi faktor internal dan faktor eksternal dengan analisis SWOT.

Identifikasi faktor internal dilakukan dengan teknik *brainstorming* (Alex Osbon) yaitu mengidentifikasi sejumlah kemampuan dan sumber daya internal yang dapat diandalkan dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Hasil *brainstorming* dikelompokkan ke dalam kategori *strenghts* (kekuatan) dan *weaknessses* (kelemahan)

Dari hasil analisis SWOT dengan teknik *brainstorming* , faktor kekuatan (*strenghts*) sebagai berikut:

1. Adanya dukungan kebijakan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Tersedianya Balai Latihan Perkoperasian dan UMKM.
3. Tersedianya Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM.
4. Jumlah Koperasi dan UMKM yang terus berkembang
5. Tersedianya sumber daya alam yang potensial
6. Terjalannya kerjasama antar Kabupaten/Kota
7. Adanya semangat dan komitmen untuk membangun ekonomi masyarakat.

Dari uraian kekuatan diatas, terdapat juga kelemahan yang harus diantisipasi sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data mengenai KUMKM yang valid dan

akurat

2. Masih banyaknya Koperasi yang tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
3. Belum tersedianya Gedung Pusat Promosi Produk KUMKM
4. Sebagian besar UMKM bersipat non formal dan berskala Mikro, diversifikasi produknya masih terbatas.
5. Potensi sumber daya di Provinsi Bangka Belitung belum dimanfaatkan secara optimal oleh Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2.4.2 Tantangan dan Peluang

2.4.2.1 Identifikasi faktor Eksternal (peluang dan tantangan)

Identifikasi faktor eksternal adalah merupakan faktor-faktor yang ikut mempengaruhi merupakan input bagi organisasi berupa lingkungan, dukungan, harapan, keinginan dan yang memberikan manfaat besar dikemudian hari di kategorikan sebagai peluang (Opportunities).

Adapun peluang-peluang yang dapat diidentifikasi melalui teknik *brainstorming* untuk mencapai visi dan misi sebagai berikut :

1. Pasar dalam dan luar negeri yang terbuka bagi produk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan menengah.
2. Tersedianya akses Informasi dan teknologi
3. Geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Strategis.
4. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Destinasi Wisata Nasional.
5. Mayoritas pelaku usaha adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sedangkan tantangan (treats) yang dapat menghalangi pencapaian Visi dan Misi yang harus diantisipasi sebagai berikut:

1. Persaingan yang semakin ketat bagi pelaku usaha (UMKM) dan Koperasi dengan masuknya produk-produk dari pasar global

dengan harga dan kualitas yang kompetitif.

2. Produk Koperasi dan UMKM, sebagian belum memenuhi standar mutu baik nasional maupun internasional.
3. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif.
4. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
5. Rendahnya kapasitas SDM KUMKM.

2.4.3. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah antara lain :

a. Faktor-faktor Penghambat

1. Belum dimilikinya data seluruh potensi KUMKM secara *up to date, by name by address* dengan lokus yang jelas (*goespasial*)
2. Kurangnya sinergitas antar SKPD serta *stakeholder* lain dalam upaya pembinaan dan pengembangan KUMKM

b. Faktor-faktor Pendorong

1. Adanya komitmen pengembangan KUMKM sebagai pioneer ekonomi kerakyatan oleh pelaku usaha itu sendiri, BUMN/BUMD, masyarakat, dan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat
2. Perkembangan jumlah KUMKM yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi pelayanan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, dapat diidentifikasi permasalahan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM sebagai berikut :

1. Masih rendahnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UMKM;
2. Terbatasnya kemampuan wirausaha SDM Koperasi dan UMKM;
3. Terbatasnya jaringan usaha baik UMKM maupun koperasi;
4. Rendahnya kemampuan KUMKM dalam mengakses sumber permodalan;
5. Belum optimalnya kemampuan desain *packaging*;
6. Terbatasnya pemasaran produk KUMKM;
7. Keterbatasan dana pembinaan dan pengembangan KUMKM pada kabupaten/kota sehingga sinergitas pembinaan dan pengembangan KUMKM yg dilakukan OPD Provinsi kurang maksimal;
8. Terbatasnya calon eksportir dan promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;
9. Organisasi PKL belum terorganisir secara formal;
10. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;

11. Belum tersedia dan terkelolanya data dan informasi mengenai KUMKM yang akurat untuk mendukung proses pembinaan dan pengembangan;
12. Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”***.

Pernyataan visi ini mengandung lima makna yaitu :

1. ***Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*** adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. ***Sejahtera*** menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pendapatan masyarakatnya meningkat dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat mengecil.
3. ***Maju*** adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara

maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (good governance).

4. **Unggul** dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung yang Unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan dukungan semua sektor.
5. **Teknologi** dimaknai Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta untuk pencapaian Visi dan Misi yang Efisien dan Cepat serta berdaya saing berbasis teknologi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017 – 2022, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;
3. Peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan handal;
4. Peningkatan kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan memperhatikan visi, misi serta kebijakan umum Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, maka yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Misi 1 : Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pengembangan dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta dikaitkan dengan Renstra kementerian/lembaga maupun renstra kabupaten/kota.

Berikut adalah Kebijakan, Program dan Kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia :

1. Peningkatan akses pasar ekspor & fasilitasi ekspor;
2. Peningkatan pengawasan dan perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri;
3. Peningkatan daya saing ekspor;
4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan internasional;
5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri;
6. Peningkatan kinerja sektor perdagangan besar & eceran dan ekonomi kreatif;
7. Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen;
8. Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLPKUKM);
9. Rencana Program/kegiatan Pembangunan lintas pelaku (stakeholder) termasuk di daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, serta antar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Daerah (Propinsi/D.I. dan Kabupaten/Kota);

11. Penciptaan jaringan distribusi perdagangan yang efisien.

Berdasarkan hal tersebut di atas, faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD kabupaten/kota antara lain adalah:

1. Terbatasnya anggaran kementerian untuk mengakomodir pengembangan KUMKM yang tidak terfasilitasi oleh anggaran Pemerintah Provinsi;
2. Kurangnya koordinasi antar sektor terkait;
3. Perbedaan tingkat perkembangan bidang usaha pada setiap daerah;

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat diarahkan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sampai saat ini belum teridentifikasi.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Sampai saat ini secara ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih mengandalkan sektor pertambangan dan sektor pertanian. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi sementara sektor pertambangan memiliki keterbatasan

sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sektor pertanian memiliki keterbatasan ketersediaan lahan, maka mutlak diperlukan adanya perubahan. Salah satunya adalah dengan mengembangkan bidang usaha perdagangan dan perindustrian, dalam hal ini koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai alternatif bagi peningkatan perekonomian rakyat. Pengembangan bidang usaha ini harus memperhatikan peluang atau potensi daerah, dan harus dikemas dalam penataan dan pengelolaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Potensi lainnya berupa pelaku ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah yang relatif bertambah setiap tahunnya namun belum tertangani secara optimal. Terutama sektor informal. Sektor informal merupakan potensi ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi apabila berbasis ilmu Pengetahuan, Teknologi, Kreatif, Inovatif serta dapat menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan.

Berikut ini adalah Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, antara lain :

1. Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;
2. Masih rendahnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM;
3. Minimnya jaringan usaha baik UKM maupun koperasi;
4. Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;
5. Belum standarnya desain *packaging* produk KUKM;
6. Masih terbatasnya fasilitasi pemasaran produk KUKM;
7. Belum terjalin sinergitas pembinaan dan pengembangan KUKM dengan OPD pada kabupaten/kota;

8. Masih kurangnya pembinaan terhadap calon eksportir dan pelaku promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;
9. Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan;
10. Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;
11. Lemahnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak;
12. Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.

BAB IV

TUJUAN dan SASARAN

Perubahan yang terjadi begitu pesat dan tanpa dapat diprediksi, baik secara internal maupun eksternal, diantaranya globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, otonomi daerah, perubahan iklim global, demokratisasi dan lain-lain. Kondisi ini harus dihadapi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari perubahan itu. Oleh karena itu agar tetap dapat eksis dan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efisien dan efektif berupa kerja, karya, dan kinerja, maka perlu digunakan manajemen strategis dalam bekerja sebagai sebuah organisasi.

Manajemen strategis merupakan suatu konsep yang menggunakan pendekatan antisipasi perubahan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan organisasi, dengan memperhatikan perubahan lingkungan internal dan eksternal melalui salah satu analisa, yaitu analisa SWOT.

Manajemen strategis menghasilkan salah satu konsep yang disebut rencana strategis (Renstra). Renstra ini berisikan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan selama 5 tahun. Dengan mempedomani konsep/teori/pola renstra ini beserta RPJMD, dan RPJP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka melalui proses diskusi dengan staf, para pemangku kepentingan, masukan dan arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur, serta masukan dari masyarakat maupun LSM maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan kebijakan sebagai berikut :

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan guna mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Periode 2017-2022 yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.1.1 TUJUAN

Tujuan OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah “meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM”. Secara spesifik tujuan tersebut dibagi menjadi beberapa opsi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan usaha kecil;
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
4. Meningkatkan pemberdayaan Usaha Kecil, dan
5. Meningkatkan kinerja Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM

4.1.2 SASARAN

1. Sasaran dari peningkatan kualitas SDM KUMKM terlatih adalah:
 - a. Meningkatkan jumlah SDM koperasi yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan dan sektor pariwisata;
 - b. Meningkatkan jumlah SDM usaha kecil yang terlatih pada sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata dan sektor lain-lain.
2. Sasaran dari pembinaan kelembagaan dan pengawasan koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

- a. Meningkatkan pertumbuhan jumlah Koperasi aktif pada kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu, Minapolitan Lepar Pongok, Etalase Perikanan Selat Nasik dan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga dengan total 15,5 % pertahun
 - b. Meningkatkan pertumbuhan jumlah kelembagaan koperasi pendukung pariwisata, koperasi sektor pertanian khususnya karet, lada dan sapi serta sektor kelautan dan perikanan dengan total target 12,7 % pertahun
 - c. Meningkatkan pertumbuhan jumlah koperasi berkualitas pada bidang kelautan dan perikanan, sektor pariwisata dan sektor pertanian dengan target 6,6 % pertahun
3. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi :
- a. Meningkatkan volume usaha koperasi pada sektor pariwisata, koperasi pertanian, lada dan sapi, serta sektor kelautan dan perikanan dengan target rata-rata 10% pertahun
 - b. Meningkatkan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan sebesar 4% pertahun
 - c. Meningkatkan investasi koperasi sektor pariwisata sebesar 7% pertahun
4. Sasaran dari peningkatan pemberdayaan usaha kecil adalah:
- a. Meningkatkan produk usaha kecil yang tersertifikasi pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, sektor kelautan dan perikanan serta sektor pariwisata dengan total keseluruhan sebesar 2.360,3% dalam kurun waktu 5 tahun;
 - b. Meningkatkan produk usaha kecil yang dikembangkan sebanyak 70 produk atau sebesar 40% dalam 5 tahun;
 - c. Meningkatkan pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan sebesar 29% dalam 5 tahun;
 - d. Meningkatkan volume usaha pelaku usaha kecil sebesar 15% pertahun atau 75% dalam 5 tahun, dan
 - e. Meningkatkan jumlah wirausaha baru sebesar 75% dalam 5 tahun.

5. Sasaran dari peningkatan kinerja pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUKM adalah meningkatkan pertumbuhan produk parekraf sebesar 10% pertahun dan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM	1. Kualitas SDM KUMKM	Persentase SDM Usaha Kecil terlatih	0,69	1,07	1,11	1,16	1,17	
			Persentase SDM Koperasi terlatih	4,14	10,3	10,32	12,38	14,49	
		2. Volume usaha KUMKM	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	10	10	11	11	12	
			Persentase peningkatan volume usaha kecil	15	15	15	15	15	
		3. Daya saing produk KUMKM	Persentase peningkatan produk usaha kecil yang tersertifikasi	1.672	243,42	133,80	133,80	133,80	
			Persentase peningkatan produk usaha kecil yang dikembangkan	40	43	20	17	18	
			Persentase peningkatan pelaku usaha kecil yang melakukan kemitraan	5	5,75	6,75	5,75	5,75	
			Persentase peningkatan wirausaha	15	15	15	15	15	
			4. Nilai tambah produk KUMKM	Pertumbuhan produk parekraf	10	10	10	10	10
			5. Kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5
			Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	
			Persentase koperasi berkualitas	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	
			Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM						

4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tujuan merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran dirumuskan dengan memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2017 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 4.2

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2017-2022**

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN		STRATEGI PD	PROGRAM PD	INDIKATOR PROGRAM	
		DAMPAK (IMPACT)	TARGET 2022			HASIL (OUTCOME)	TARGET 2022
Meningkatkan nilai tambah, daya saing produk, skala usaha dan kualitas SDM KUMKM	1. Kualitas SDM KUMKM 2. Skala usaha KUMKM 3. Daya saing produk KUMKM 4. Nilai tambah produk KUMKM	1. Jumlah SDM KUMKM yang terlatih	3.750 pelaku usaha	1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 2. Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 3. Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi 4. Pembinaan dan Pengembangan UMKM 5. Pendampingan terhadap KUMKM	1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah 2. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pelatihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 4. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase SDM Koperasi terlatih	51,59%
		2. jumlah Koperasi berkualitas	110 koperasi				5,26%
		3. Pertumbuhan volume usaha UMKM	75%				5,26%
		4. Pertumbuhan UMKM	1%				77,77%
		5. Peningkatan Usaha Kecil menjadi usaha menengah	2%				63,63%
		6. Jumlah produk KUMKM yang berdaya saing	70 produk				33,3%
		7. Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	12%				2.360,3%
							130%
							29%

						Peningkatan volume usaha pelaku usaha kecil	75%
					5. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi.	Persentase peningkatan wira usaha	75%
						Persentase peningkatan volume usaha koperasi	12%
						Persentase peningkatan investasi koperasi	55%
					6. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM	Dengan peningkatan sebesar 2% pertahun
						Pertumbuhan produk parekraf	50%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi adalah langkah – langkah yang diambil oleh perangkat daerah yang berisikan program – program unggulan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Strategi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Mendayagunakan rapat dan hasil koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan antar OPD Provinsi, dengan Pemerintah Pusat/KL dan dengan Pemerintah dan OPD Kabupaten/ Kota;
2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak lain terkait Pelatihan SDM KUMKM (Instansi/lembaga terkait, BUMN/BUMD, sektor swasta).
3. Menciptakan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif;
4. Mengembangkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah;
5. Mengembangkan kapasitas SDM Koperasi dan UKM;
6. Penyusunan regulasi tentang pemberdayaan Koperasi dan UKM;
7. Peningkatan pemahaman pelaku usaha untuk mengurus perijinan/legalitas usaha (fasilitasi/sosialisasi/bimtek);
8. Memfasilitasi pelaku usaha agar kualitas produk meningkat (sertifikasi halal, pendaftaran HKI, temu usaha/kemitraan).
9. Memfasilitasi pelaku usaha agar kualitas produk meningkat (temu mitra dengan rumah kemasan, Bimtek)
10. Memfasilitasi pelaku usaha dalam kerja sama, promosi dan pemasaran produk unggulan (temu mitra, pameran, seminar

promosi, pemasaran produk KUMKM melalui marketing online, fasilitasi galeri khusus KUMKM di tingkat provinsi, tingkat pusat dan pusat perbelanjaan modern)

11. Memfasilitasi pelaku usaha Koperasi dan UKM untuk dapat mengakses permodalan ke Lembaga Keuangan bank dan Non Bank
12. Pendampingan bagi pelaku usaha untuk pengembangan usaha (seminar perubahan culturset, magang, bantuan peralatan)

5.2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Adapun kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Menjadikan Dinas Koperasi yang memberdayakan/ membina Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kota sebagai kekuatan utama pembinaan pada KUMKM.
2. Potensi ekonomi lokal wilayah pedesaan dan perkotaan akan dijadikan kekuatan sumber daya utama dalam pengembangan usaha KUMKM.
3. Gerakan kewirausahaan dijadikan pemicu KUMKM dan pemacu utama kemajuan dan daya saing ekonomi.
4. Pengembangan kapasitas SDM Koperasi dan UKM dapat dilakukan secara mandiri dengan menggunakan APBD, DAK, atau dengan menjalin kerja sama dengan pihak lain terkait Pelatihan SDM KUMKM (Instansi/lembaga terkait, BUMN/BUKD, sektor swasta).
5. Regulasi tentang pemberdayaan UKM (pembuatan/ penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

serta Petunjuk Teknis) dijadikan sebagai salah satu dasar hukum pembinaan/pengembangan KUMKM;

6. Pemahaman pelaku usaha tentang perijinan dan legalitas KUMKM perlu terus ditingkatkan (fasilitasi/sosialisasi/bimtek);
7. Peningkatan kualitas produk KUMKM terus dilakukan agar produk unggulan daerah memiliki daya saing (sertifikasi halal, pendaftaran HKI, temu usaha/kemitraan);
8. Pendampingan bagi pelaku usaha dalam rangka pengembangan usaha guna meningkatkan skala/volume usaha perlu terus dilakukan agar kontribusi KUMKM terhadap PDRB semakin besar (seminar perubahan culturset, magang, bantuan peralatan);
9. Peningkatan kualitas produk KUMKM (temu mitra dengan rumah kemasan, Bimtek);
10. Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah perlu terus ditingkatkan (Pameran, seminar promosi dan pemasaran produk UMKM melalui marketing online, fasilitasi galeri Khusus UKM di tingkat provinsi, tingkat pusat dan pusat perbelanjaan modern);
11. Memfasilitasi pelaku Koperasi dan UKM untuk dapat mengakses permodalan ke Lembaga Keuangan bank dan Non Bank;

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lima tahun mendatang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi					
MISI I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah					
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan dan perkebunan	1. Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan	1.1	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	
			1.2	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	
	2. Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan		2.1 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	2.1.1	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
				2.1.2	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
				2.1.3	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.
			2.2 Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan	2.2.1	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
				2.2.2	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
				2.2.3	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan

	<p>3. Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata</p>	<p>3.1 Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata</p>	<p>3.1.1 Tanjung Binga Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata</p> <p>3.1.2 Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.</p> <p>3.1.3 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah</p> <p>3.1.4 Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan</p> <p>3.1.5 Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.</p>
	<p>4. Meningkatnya Produksi sektor pertambangan</p>	<p>4.1 Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan</p>	<p>4.1 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral</p>
	<p>5. Meningkatnya pembangunan berbasis industri</p>	<p>5.1 Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah</p>	<p>5.1 Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu</p>
	<p>6. Menurunnya angka Pengangguran</p>	<p>6.1 Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan</p>	<p>6.1 Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja</p>
	<p>7. Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas</p>	<p>7.1 Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>7.1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan pembangunan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan implemetasi dari rencana kerja pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka telah dirumuskan kegiatan yang dikelompokkan ke dalam 6 program. Penetapan program ini disesuaikan dengan Permendagri 13 dan 59 serta Program Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, serta mengakomodir program dan kegiatan Pembinaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota.

Secara terinci program dan kegiatan tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1. Meningkatkan manajemen pemerintah berbasis kinerja	Nilai akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH																
			1. Pelayanan administrasi perkantoran	persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan (%)		100	2.420.000.000	100	2.480.000.000	100	2.600.000.000	100	2.850.000.000	100	3.080.000.000	100	3.430.000.000	DKUKM	SKPD
			2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan (%)		100	515.000.000	100	600.000.000	100	800.000.000	100	1.000.000.000	100	1.200.000.000	100	4.115.000.000	DKUKM	SKPD
			3. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya (%)		100	100.000.000	100	100.000.000	100	135.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	635.000.000	DKUKM	SKPD
			4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (%)		100	110.000.000	100	150.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	100	890.000.000	DKUKM	SKPD
			5. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (Dokumen		2	140.000.000	2	150.000.000	2	160.000.000	2	170.000.000	3	250.000.000	11	870.000.000	DKUKM	SKPD

			6. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% (Dokumen)		3	15.000.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	70.000.000	15	160.000.000	DKUKM	SKPD
2.Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi																			
	1.Meningkatnya produksi subsektor pertanian, peternakan dan perkebunan		1. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	1. Persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian 2. Persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi		3%	294.000.000	3%	814.650.000	3%	956.998.000	3%	1.049.602.400	3%	1.007.059.200	15%	4.122.309.600	DKUKM	SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal pinang
			1.Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	1.Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan pembekalan tentang perkoperasian		35	240.500.000	70	294.850.000	105	795.060.000	140	841.602.400	175	835.559.200	525	3.007.571.600	DKUKM	SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal pinang
			2.Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha	1.Jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha		15	118.000.000	15	696.850.000	20	410.142.000	10	449.829.000	20	671.372.000	80	2.346.193.000	DKUKM	SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal pinang
			3.Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	1. Jumlah koperasi yang mendapatkan pengembangan penguatan dan perlindungan		10	33.500.000	20	94.500.000	30	161.938.000	35	208.000.000	40	171.500.000	135	669.438.000	DKUKM	SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal pinang
			2. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1. Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih 2. persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih 3. persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan		1,38 %	110.250.000	3,09 %	244.500.000	4,68 %	409.500.000	3,44 %	269.100.000	4,68 %	456.106.000	17,27 %	1.489.456.000	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal
						0 %	427.500.000	0,34 %	946.880.000	0,36 %	1.105.545.280	0,34 %	878.198.000	0,37 %	1.125.300.000	1,78 %	4.483.423.280	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal
						100%	535.000.000	100%	700.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.200.000.000	100%	4.335.000.000	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal

																			pinang
			1. Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	1. Jumlah SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	0	20	110.250.000	45	244.500.000	68	409.500.000	68	269.100.000	68	456.106.000	269	1.489.456.000	DKUKM	
				2. Jumlah SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0	118	427.500.000	210	946.880.000	210	1.105.545.280	210	878.198.000	210	1.125.300.000	958	4.483.423.280	DKUKM	
			2. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada Pelatihan Koperasi dan UKM	1. Jumlah aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan			535.000.000		700.000.000		900.000.000		1.000.000.000		1.200.000.000		4.335.000.000	DKUKM	
			3. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	1. Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi sektor pertanian		5%	272.000.000	5%	210.000.000	5%	218.000.000	5%	222.800.000	5%	244.000.000	25%	1.168.800.000	DKUKM	SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkalpinang
				2. Persentase koperasi berkualitas sektor pertanian		2%	345.000.000	2%	681.350.000	2%	1.133.000.000	2%	895.450.000	2%	1.317.850.000	10%	4.372.710.000	DKUKM	
			1. Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Jumlah kelompok strategis yang mendapatkan sosialisasi pembentukan koperasi	0	12	272.000.000	11	210.000.000	11	218.000.000	11	222.800.000	11	244.000.000	11	1.166.800.000	DKUKM	
			2. Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan keanggotaan dan penerapan peraturan perkoperasian	0	15	199.500.000	15	491.750.000	20	700.000.000	10	568.050.000	20	784.000.000		2.743.360.000	DKUKM	
			3. Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan penilaian kesehatan	5	20	145.500.000	15	189.600.000	15	433.000.000	15	327.400.000	10	533.850.000		1.629.350.000	DKUKM	
			4. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	1. Persentase produk usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi		61.30%	1.006.950.000	77%	900.000.000	43.48%	900.000.000	43.48%	900.000.000	43.48%	900.000.000	311,22%	5.342.550.000	DKUKM	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka

				2. Pertumbuhan produk usaha kecil yang dikembangkan		0	--	3%	250.000.000	3%	200.000.000	0	--	3%	300.000.000	--	750.000.000		Tengah, Bangka, Belitung Timur, Pangkalpinang
				3. Pertumbuhan volume usaha kecil		0,3%	339.320.000	0,3%	368.500.000	0,3%	520.000.000	0,3%	333.664.000	0,3%	458.320.000		2.019.804.000		
				4. Pertumbuhan pelaku usaha kecil		5%	50.000.000	5%	50.000.000	5%	50.000.000	2%	50.000.000	6%	50.000.000		250.000.000		
			1. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	1. jumlah produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	40	245	1.006.980.000	200	900.000.000	200	900.000.000	200	900.000.000	200	900.000.000		5.342.550.000	DKUKM	
				2. jumlah produk usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang dikembangkan dengan bantuan peralatan tepat guna	0	0	0	5	250.000.000	4	200.000.000	0	0	7	300.000.000		750.000.000	DKUKM	
				3. jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	0	80	66.000.000	90	76.500.000	100	120.000.000	90	81.000.000	100	95.000.000		438.500.000	DKUKM	
				4. jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	0	10	125.000.000	10	150.000.000	10	175.000.000	10	175.000.000	10	175.000.000		800.000.000	DKUKM	
			2. Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	1. Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/pemasaran produknya melalui even pameran	55	5	183.320.000	5	210.000.000	5	310.000.000	3	166.664.000	4	193.320.000		1.063.304.000	DKUKM	
				2. Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian,	35	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000		250.000.000	DKUKM	

				peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/pemasaran produknya melalui web															
				3. Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan IUMK	2.500	500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	250.000.000	DKUKM		
				4. Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	10	40.000.000	8	32.000.000	10	40.000.000	9	36.000.000	30	120.000.000	268.000.000	DKUKM		
	2.Meningkatnya produksi sub sektor perikanan		1. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOOPERASI	1. Persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan		5%	490.000.000	5%	1.364.300.000	5%	1.367.140.000	5%	1.499.432.000	5%	1.678.432.000	25%	6.399.304.000	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkal pinang
			1. Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi		10	80.000.000	20	729.300.000	20	770.140.000	20	802.432.000	20	865.932.000	90	3.247.804.000	DKUKM	
			2. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan pembekalan tentang perkoperasian		10	136.500.000	20	217.000.000	30	267.000.000	40	318.000.000	50	349.000.000	150	1.387.500.000	DKUKM	
			3. Pengembangan, penguatan dan	Jumlah pengurus koperasi yang		20	273.500.000	30	418.000.000	25	330.000.000	28	379.000.000	30	463.500.000	133	1.864.000.000	DKUKM	

			perlindungan koperasi	mendapatkan pengembangan dan perlindungan koperasi															
			2. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN ,MENENGAH	1.Persentase SDM Koperasi sektor perikanan terlatih 2.Persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih 3.Persentase pelaku usaha terlatih bidang keterampilan usaha produktif		1.38 %	110.250.000	3.09 %	244.500.000	4.68 %	409.500.000	3.44 %	260.100.000	4.68 %	456.106.000	17.27 %	1.488.456.000	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkalpinang
			1.Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	1. Jumlah SDM Koperasi sektor perikanan terlatih 2. Jumlah SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih 3. Jumlah pelaku usaha terlatih bidang keterampilan usaha produktif (Vocational) (UMKM/orang)	0	20	110.250.000	45	244.500.000	38	409.500.000	38	260.100.000	38	456.106.000	217	1.488.456.000	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkalpinang
			3. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	1.Persentase koperasi bidang kelautan dan perikanan yang berkualitas 2.Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi sektor kelautan dan perikanan	0	208	712.500.000	150	650.980.000	150	725.514.090	150	649.036.000	150	853.050.000	808	3.591.080.090	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkalpinang
						3.60 %	256.500.000	3.60 %	632.250.000	3.60 %	900.000.000	3.60 %	730.000.000	3.60 %	1.008.000.000	18.30 %	3.527.100.000	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkalpinang
						5 %	272.000.000	5 %	210.000.000	5 %	218.000.000	5 %	222.800.000	5 %	244.000.000	25 %	1.166.800.000	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkalpinang

			1. Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	1. Jumlah penumbuhan kelembagaan koperasi sektor kelautan dan perikanan		12	256.500.000	11	632.250.000	11	900.000.000	11	730.000.000	11	1.008.000.000	56	3.527.100.000	DKUKM	
			2. Peningkatan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	1. Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan keanggotaan dan penerapan peraturan perkoperasian	0	30	122.000.000	30	100.000.000	30	98.000.000	30	100.800.000	30	120.000.000	150	540.800.000	DKUKM	
			3. Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	1. Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan penilaian kesehatan		10	150.000.000	10	110.000.000	10	120.000.000	10	122.000.000	10	124.000.000	50	626.000.000	DKUKM	
			4. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	1. Peningkatan produk Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi		550	2.260.500.000	550	2.475.000.000	550	2.475.000.000	550	2.475.000.000	550	2.475.000.000	2.750	12.160.000.000	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Pangkal pinang
				2. Pertumbuhan volume usaha kecil	0,5%		601.644.000	0,5%	672.000.000	0,5%	867.000.000	0,5%	623.329.000	0,5%	668.644.000	2,5%	3.432.617.000	DKUKM	
				3. Pertumbuhan pelaku usaha kecil	7%		95.000.000	7%	95.000.000	7%	95.000.000	7%	95.000.000	7%	95.000.000	35%	475.000.000	DKUKM	
			1. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	1. jumlah produk Usaha kecil sektor pertanian yang terstandarisasi dan tersertifikasi	70	550	2.260.500.000	550	2.475.000.000	550	2.475.000.000	550	2.475.000.000	550	2.475.000.000	2.750	12.160.000.000	DKUKM	
				2. jumlah pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	0	10	125.000.000	10	150.000.000	10	175.000.000	10	175.000.000	10	175.000.000	50	800.000.000	DKUKM	
			2. Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	1. Jumlah Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan IUMK	3.500	950	95.000.000	950	95.000.000	950	95.000.000	950	95.000.000	950	95.000.000	4.750	475.000.000	DKUKM	

			2. Jumlah Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/pemasaran produknya melalui even pameran	175	13	296.644.000	13	342.000.000	13	512.000.000	9	268.329.000	10	313.644.000	58	1.732.617.000	DKUKM	
			3. Jumlah Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/pemasaran produknya melalui web	60	55	100.000.000	55	100.000.000	55	100.000.000	55	100.000.000	55	100.000.000	275	500.000.000	DKUKM	
			4. Jumlah Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	N/A	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	100	400.000.000	DKUKM	
		5. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	1. Persentase koperasi aktif dikawasan strategis minapolitan lepar pongok		1%	34.000.000	1%	34.000.000	1%	42.000.000	1%	28.000.000	1%	48.000.000	5%	186.000.000	DKUKM	SKPD, Bangka Selatan, Belitung Timur, Belitung
			2. Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik		1%	34.000.000	1%	34.000.000	1%	42.000.000	1%	28.000.000	1%	48.000.000	5%	186.000.000	DKUKM	
			3. Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan tanjung binga		1%	34.000.000	1%	34.000.000	1%	42.000.000	1%	28.000.000	1%	48.000.000	5%	186.000.000	DKUKM	
		1. Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Jumlah koperasi aktif di kawasan strategis provinsi		6	102.000.000	6	102.000.000	6	126.000.000	6	84.000.000	6	144.000.000	6	558.000.000	DKUKM	
	3. Meningkatkan pengembangan pembangunan pariwisata	1. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	1. Pertumbuhan kelembagaan koperasi pendukung pariwisata		2.70%	278.500.000	2.70%	755.980.000	2.70%	1.076.352.120	2.70%	971.142.000	2.70%	1.083.950.000	13.63%	4.165.924.120	DKUKM	SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah,

																			Bangka, Belitung, Pangkalpinang	
			1. Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Penumbuhan jumlah koperasi pendukung pariwisata	2	2	136.000.000	2	105.000.000	2	109.000.000	2	111.400.000	2	122.000.000	2	583.400.000	DKUKM		
			2. Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan keanggotaan dan penerapan peraturan perkoperasian	0	4	142.500.000	6	650.980.000	8	967.352.120	10	859.742.000	12	961.950.000		3.582.524.120	DKUKM		
			2. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOOPERASIAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1. Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih 2. Persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih			0.69 % 0.06 %	47.250.000 142.500.000	2.06 % 0.25 %	163.000.000 650.980.000	1.51 % 0.32 %	136.500.000 967.352.120	2.75 % 0.32 %	179.400.000 859.742.000	2.20 % 0.32 %	79.818.550 961.950.000	9.21 % 1.27 %	605.968.550 3.582.524.120	DKUKM DKUKM	SKPD, Belitung Timur, Belitung,
			1. Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	1. Jumlah SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih 2. Jumlah SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0	10	47.250.000	30	163.000.000	22	136.500.000	22	179.400.000	22	79.818.550	106	605.968.550	DKUKM		
			3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	1. Penumbuhan produk parekraf			10 %	560.000.000	10 %	620.000.000	10 %	670.000.000	10 %	720.000.000	10 %	800.000.000	50 %	3.380.000.000	DKUKM	SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkalpinang
			1. Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	Jumlah produk parekraf			14	560.000.000	14	620.000.000	14	670.000.000	14	720.000.000	14	800.000.000	70	3.380.000.000	DKUKM	
			4. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOOPERASI	1. Persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata			1 %	98.000.000	1 %	199.500.000	2 %	457.320.000	2 %	546.856.000	2 %	570.000.000	5 %	1.871.676.000	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan,

																			Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkalpinang
			1. Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha Koperasi	1	13.000.000	2	85.000.000	4	255.000.000	4	293.856.000	5	302.500.000	16	949.356.000	DKUKM		
			2. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan pembekalan tentang perkoperasian	5	55.000.000	10	62.500.000	15	88.000.000	20	113.000.000	25	121.500.000	75	440.000.000	DKUKM		
			3. Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengembangan dan perlindungan koperasi	2	30.000.000	3	52.000.000	6	114.320.000	8	140.000.000	8	146.000.000	27	482.320.000	DKUKM		
			5. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	1. Persentase koperasi sektor pariwisata yang berkualitas	1%	114.000.000	1%	281.000.000	1%	400.000.000	1%	324.000.000	1%	448.000.000	5%	1.567.600.000	DKUKM	SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkalpinang	
			1. Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Jumlah koperasi sektor pariwisata yang berkualitas	0	114.000.000	2	281.000.000	2	400.000.000	2	324.000.000	2	448.000.000	10	1.567.600.000	DKUKM		
			6. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	1. Peningkatan produk usaha kecil sektor pariwisata yang terstandarisasi dan tersertifikasi	205	842.550.000	250	750.000.000	250	650.000.000	250	500.000.000	250	650.000.000	1.205	5.342.550.000	DKUKM	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung,	
				2. Pertumbuhan volume usaha kecil	0,2%	300.000.000	0,2%	48.000.000	0,2%	40.000.000	0,2%	40.000.000	0,2%	260.000.000	1%	680.000.000			
				3. Pertumbuhan pelaku usaha kecil	3%	94.000.000	3%	94.000.000	3%	94.000.000	3%	94.000.000	3%	94.000.000	15%	470.000.000			

																		Pangkalpinang
			1. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	1. jumlah produk Usaha kecil sektor pertanian yang terstandarisasi dan tersertifikasi			842.550.000		750.000.000		650.000.000		500.000.000		650.000.000		5.342.550.000	DKUKM
	4.		2. Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	1. Jumlah Usaha Kecil sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper) 2. Jumlah Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan IUMK 3. Jumlah Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	100 1.200 N/A	600 940 10	260.000.000 94.000.000 40.000.000									600 4.700 107	260.000.000 470.000.000 428.000.000	DKUKM DKUKM DKUKM
	5. Meningkatnya produksi sektor pertambangan		3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1. Persentase SDM Koperasi sektor pertambangan terlatih 2. Persentase SDM usaha kecil sektor pertambangan terlatih		0,014% 0,046	35.000.000 107.500.000	0,045% 0,135%	110.000.000 333.850.000	0,03% 0,1%	92.000.000 253.482.900	0,05% 0,13%	111.000.000 304.260.000	0,04% 0,1%	97.000.000 266.000.000	0,179% 0,511%	445.000.000 1.270.092.900	DKUKM DKUKM
			1. Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	1. Jumlah SDM Koperasi sektor pertambangan terlatih 2. Persentase SDM usaha kecil sektor pertambangan terlatih		10 32	35.000.000 107.500.000	30 90	110.000.000 333.850.000	22 60	92.000.000 253.482.900	22 60	111.000.000 304.260.000	22 60	97.000.000 266.000.000	106 302	445.000.000 1.270.092.900	DKUKM DKUKM
			3. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOOPERASI	1. Persentase koperasi aktif sektor pertambangan			142.500.000		443.850.000		345.482.900		415.260.000		363.000.000		1.710.092.900	DKUKM
																		Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Belitung, Pangkalpinang

			1. Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Jumlah koperasi aktif sektor pertambangan		1	142.500.000	1	443.850.000	1	345.482.900	1	415.260.000	1	363.000.000	5	1.710.092.900	DKUKM	
	6. Meningkatnya pembangunan berbasis industri		1. PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN	1. Persentase koperasi aktif di kawasan strategis teluk kelabat beliyu		1%	0	1%	34.000.000	1%	42.000.000	1%	28.000.000	1%	48.000.000	5%	152.000.000	DKUKM	Kabupaten Bangka
			1. Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Jumlah koperasi aktif di kawasan strategis teluk kelabat beliyu			1		34.000.000	1	42.000.000	1	28.000.000	1	48.000.000	5	152.000.000	DKUKM	
3. Meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat	1. Menurunnya angka Pengangguran		1. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	1. Persentase peningkatan wirausaha		15%	15.530.000.000	15%	18.200.000.000	15%	11.055.600.000	15%	1.080.000.000	15%	1.780.000.000	75%	47.646.600.000	DKUKM	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur, Pangkal pinang
4.	2.		1. Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Jumlah pelaku usaha yang meningkat kualitas kewirausahaannya		50	680.000.000	60	735.000.000	70	800.000.000	80	945.000.000	90	1.150.000.000	350	4.310.000.000	DKUKM	
			1. Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pendampingan promosi		50	1.530.000.000	60	1.820.000.000	70	1.055.600.000	80	1.080.000.000	90	1.780.000.000	350	7.266.600.000	DKUKM	
			2. Pembangunan Gedung Pemasaran Produk KUKM	Terbangunnya gedung pemasaran produk KUKM			14.000.000.000		16.380.000.000		10.000.000.000						40.380.000.000	DKUKM	Bangka Tengah
4. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	1. Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)		1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM		90%	760.000.000	92%	840.000.000	94%	915.000.000	96%	1.000.000.000	98%	1.085.000.000		4.600.000.000	DKUKM	SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung Timur,

																			Belitung, Pangkal pinang
			1. Peningkatan Layanan Usaha Terpadu			760.000.000		840.000.000		915.000.000		1.000.000.000		1.085.000.000		4.600.000.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan koperasi aktif	90 koperasi	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%	15,5%	160 Kop
2	Pertumbuhan kelembagaan koperasi	110 koperasi	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	12,7%	180 Kop
3	Peningkatan koperasi berkualitas	90 koperasi	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	6,6%	120 Kop
4	Peningkatan volume usaha koperasi	Rp556.979.638.574,-	10%	10%	11%	11%	12%	54%
5	Peningkatan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan	Rp600.000.000,-	4%	4%	4%	4%	4%	20%
6	Peningkatan investasi koperasi sektor pariwisata	Rp350.000.000,-	7%	7%	7%	7%	7%	35%
7	Pertumbuhan produk usaha kecil yang tersertifikasi	185 sertifikasi halal	540%	540%	540%	540%	540%	5.185 sertifikasi halal
8	Pertumbuhan produk usaha kecil yang dikembangkan	168 Produk	8%	8%	8%	8%	8%	238 produk
9	Pertumbuhan volume usaha kecil	Rp6.842.280.000.000	1%	1%	1%	1%	1%	Rp11.019.560.362.800
10	Pertumbuhan pelaku usaha kecil	57.019	15%	15%	15%	15%	15%	91.830
11	SDM koperasi terlatih	541 orang	4,13%	10,32%	10,32%	12,38%	14,49%	51,55%
12	SDM Usaha kecil terlatih	1.080 orang	0,68%	1,07%	1,12%	1,16%	1,23%	5,26%
13	Pertumbuhan produk parekraf	N/A	10%	10%	10%	10%	10%	50%
14	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUKM	N/A	90%	92%	94%	96%	98%	98%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 ini disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Dinas, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen perencanaan program dan anggaran tahunan.
3. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 - 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

4. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
5. Pengawasan, Pengendalian, dan Evaluasi di tingkat pelaksanaan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga tingkat eselon dan melekat pada masing-masing unsur satuan unit kerja.
6. Fungsi Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Dinas dan Seluruh Kepala Bidang, sedangkan Pengendalian dan Evaluasi dikoordinasikan oleh Sekretaris.
7. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 - 2022 dilakukan dengan tertib dan objektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Dinas yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pada akhir periode (tahun 2022) dilaksanakan evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Tahun 2017 - 2022, yang merupakan evaluasi kinerja jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.
8. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 - 2022 disusun berdasarkan sejumlah asumsi sesuai

perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, apabila diperlukan dapat dilakukan revisi Renstra.

9. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017 - 2022, unit kerja penyelenggara sebagaimana dijelaskan pada Tabel 8.1. berikut :

Tabel 8.1
UNIT KERJA PENYELENGGARA RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Pejabat Pelaksana	Kedudukan
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab Umum
2.	Sekretaris	Penanggungjawab Program
3.	1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	Penanggungjawab Kegiatan
	2. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	
	3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	
	4. Kepala UPTD Balai Latihan Perkoperasi dan UMKM (Balatkop & UMKM)	
	5. Kepala Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM	

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Lepar Nomor 6 Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Air Itam Pangkalpinang